

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Atas Akta PPAT Setelah Pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Dan Kabupaten Konawe Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berangkat dari adanya masalah hukum yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Konawe Selatan yang mana permasalahan tersebut terjadi akibat adanya akta PPAT yang dibuat oleh PPAT yang bukan PPAT Kabupaten Konawe Selatan. Didalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 12 Ayat (1)

ABSTRACT

This research is entitled "Legal Protection of PPAT Deeds after the Expansion of Konawe and South Konawe Regencies based on Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Position Regulations for Land Deed Making Officials". This research uses empirical juridical research method. Departing from a legal problem that occurred in the jurisdiction of the South Konawe Court, where the problem occurred due to the PPAT deed made by PPAT which was not PPAT Konawe Selatan Regency. In the provisions of government regulation number 37 of 1998 concerning Officials for Making Land Deeds Article 12 Paragraph (1)